

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemutusan Hubungan bilateral suatu negara dengan negara lainnya dalam Hubungan Internasional pada dasarnya mungkin saja terjadi. Pemutusan hubungan diplomatik biasanya digunakan sebagai langkah atau alternatif terakhir atas problematika antar negara. Adapun beberapa hal yang melatar belakangi pemutusan diplomatik; pecahnya perang antara negara negara tersebut, suatu negara memutuskan hubungan diplomatik secara sepihak yang disebabkan karena adanya protes atau ketidaksetujuan terhadap suatu tindakan dari suatu negara yang bertentangan dengan negara lain. Hal ini pula yang terjadi pada krisis Qatar dimana terjadinya pemutusan hubungan diplomatik oleh 7 negara teluk terhadap Qatar yang mungkin saja dilatarbelakangi oleh beberapa alasan yang disebutkan di atas.

Secara historis Qatar dengan Arab Saudi, Mesir, Bahrain dan Uni Emirates Arab sebelumnya memiliki hubungan yang cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan berdirinya Gulf Cooperation Council (GCC) pada tahun 1981 yang didirikan oleh Arab Saudi dan Qatar. Didirikannya GCC yang tidak hanya blok dagang namun juga sebagai konsolidasi aliansi Arab Saudi di kawasan Timur Tengah menciptakan hubungan yang erat sebelumnya bagi Qatar dan Arab Saudi, Mesir, Bahrain, dan Uni Emirates Arab. Hubungan bilateral Qatar dan negara pemutus diplomatik pun sebelumnya erat seperti kedekatan Emir Qatar Sheikh Hamad bin Khalifa al-Tsani dengan Arab Saudi yang saat itu memiliki visi yang sama dengan tujuan menjaga kestabilan kawasan(Fu, 2018). Bahkan Qatar merupakan aliansi Arab Saudi dalam koalisi militer dan dalam perang melawan pemberontak di Yaman. Selain itu, Qatar bersama negara Arab lainnya membuat pakta

keamanan dengan Amerika Serikat dimana Qatar hingga saat ini menjadi markas terbesar militer AS di Timur Tengah (Lendon, 2017). Setelah renggangnya hubungan Qatar dan negara-negara teluk tahun 2014 yang kemudian kembali membaik pada tahun 2016 yang ditandai dengan kedatangan raja Salman ke Doha tidak lain bertujuan untuk memperbaiki dan mempererat hubungan dengan Qatar kembali (Times, Gulf, 2016).

Polemik hubungan Qatar dengan khususnya Arab Saudi dan beberapa negara teluk sejatinya telah terjadi sejak pertengahan abad ke 20 yang menjadi pokok permasalahan mengenai sengketa perbatasan. Misalnya sengketa antara Bahrain dan Qatar mengenai kepemilikan pulau Hamar, dangkalan al-Dibal dan al-Jaradah serta wilayah Zubarah. Sengketa ini kemudian diselesaikan di International Court of Justice (ICJ) yang berakhir pada 2001 (Wardoyo, 2018). Pasca penyelesaian sengketa tersebut hubungan Qatar dan Bahrain kembali membaik terbukti dengan kerjasama dan kesepakatan pembangunan akses langsung (Qatar-Bahrain causeway) atau biasa disebut dengan “Qatar-Bahrain Friendship Bridge” yang disepakati pada tahun 2006 (Thakur, 2019).

Pemutusan hubungan diplomatik terhadap Qatar saat ini bukanlah yang pertama kalinya. Pada tahun 2014 Arab Saudi, Mesir, Bahrain dan Uni Emirates Arab memutuskan hubungan diplomatik nya dengan Qatar atas tuduhan bahwa Qatar telah melanggar perjanjian “kesepakatan Riyadh” adapun kesepakatan Riyadh dalam dokumen pertama yang memuat tentang komitmen negara-negara Arab untuk tidak membiayai dan mendukung suatu kelompok ekstrimis atau yang melakukan penyimpangan serta menghindari intervensi-intervensi urusan internal setiap negara dan dalam dokumen kedua yang memuat tentang tekad dan komitmen para pihak yang menandatangani perjanjian untuk menjaga stabilitas Mesir, termasuk mencegah Al Jazeera sebagai platform tokoh atau kelompok yang menentang atau melakukan perlawanan terhadap otoritas Mesir. Kesepakatan Riyadh tersebut telah disepakati oleh Qatar, Bahrain, Arab Saudi dan Uni

Emirates Arab (Amalia, Azzahra, Adiba, & , 2017). Namun polemik ini pada akhirnya terselesaikan dengan kesepakatan damai dimana Qatar mengurangi hubungannya dengan Iran, menutup Al Jazeera dan menyatakan Ikhwanul Muslimin sebagai organisasi teroris (Astri Audina Savitri, 2018).

Satu tahun berdamai pasca pemutusan hubungan diplomatik yang terjadi pada tahun 2014 yang ditandai dengan dicabutnya sanksi embargo oleh Arab Saudi dan aliansi, dikurangnya ruang gerak Al Jazeera sebagai media platform Qatar di Timur Tengah serta kedatangan Raja Salman ke Doha pada 2016 menutup polemik tersebut. Namun tidak dapat dipungkiri polemik kembali terjadi pada 5 Juni 2017 ditandai dengan pernyataan Arab Saudi yang mengatakan keterlibatan Qatar dalam mendukung kelompok terror di Timur Tengah, kemudian dukungan atas tuduhan ini pun diikuti oleh Bahrain, Mesir, Uni Emirates Arab, dan disusul oleh Maladewa (CNN, 2017).

Arab Saudi, Bahrain, Mesir, Uni Emirates Arab, dan Maladewa mengasingkan Qatar secara bertahap dan terkoordinasi dengan memblokade Qatar di darat, laut, dan udara. Keputusan negara-negara Teluk yang tergabung dalam Gulf Cooperation Council untuk mengucilkan Qatar berdasar pada pertimbangan bahwa telah terjadi upaya sistematis dan terstruktur untuk mendukung kelompok terror dalam bentuk suplai dana dan pemberitaan yang masif oleh stasiun televisi Aljazeera terhadap kelompok yang menjadi rival di negara-negara yang ikut memutus hubungan dengan Qatar (BBC, 2017). Negara-negara Teluk sepakat memberikan stigma ekstremis dan teroris kepada kelompok ideologis seperti Ikhwanul Muslimin di Mesir, Hamas di Palestina, diikuti dengan tuduhan dukungan terhadap jaringan Al Qaeda Al Nusra di Syria. Akumulasi kesalahan Qatar adalah ketika sebuah pernyataan sikap muncul di situs resmi pemerintah yang menunjukkan kedekatan Qatar dengan Iran dan Israel.

Sanksi yang diberikan oleh Arab Saudi, Bahrain, Mesir dan Uni Emirates Arab telah merubah kondisi hubungan Qatar yang sebelumnya erat. Hal ini tentu berpengaruh terhadap kondisi geopolitik di Timur Tengah. Pasang surut hubungan Qatar dan negara-negara teluk tidak lepas dari kebijakan Qatar untuk merubah **politik luar negerinya. Selain untuk memperkuat eksistensi di dunia internasional, Qatar ingin melepaskan dirinya dari bayang bayang Arab Saudi yang selama ini terlihat mengekang Qatar. Salah satu alasan yang menjadi pemantik renggangnya hubungan negara-negara teluk tidak lepas dari gejolak terorisme di Timur Tengah. Seperti muncul kecurigaan Arab Saudi atas keterlibatan Qatar dalam pendanaan teroris sejak tahun 2014.**

Kunjungan Trump ke Arab Saudi bulan lalu menjadi sinyal bahwa Gedung Putih menempatkan Arab Saudi sebagai mitra strategis dan prioritas di kawasan. Apalagi, isu utama yang dibahas pemimpin negara Teluk dan negara-negara muslim pada pertemuan dengan Trump adalah isu terorisme. Lebih dari itu, sikap Presiden Amerika Donald Trump melalui kicauannya di Twitter membuat derita Qatar semakin dalam. Trump secara terbuka menunjuk bahwa Qatar sebagai pihak yang terlibat langsung menyuplai dana bagi kelompok teroris. Situasi ini membuat Menteri Luar Negeri Qatar Muhammad At Thani merespons secara cepat dinamika yang berlangsung. Dia menyatakan bahwa keputusan negara-negara Teluk mengucilkan Qatar hanya didasarkan pada tuduhan dan misinformasi. Pesan yang disampaikan Menlu Qatar menunjukkan betapa khawatirnya negara ini dengan sikap negara-negara Teluk. Selain itu, Menteri Pertahanan Qatar Khalid bin Mohammed al-Attiyah mengatakan Qatar bukan negara yang mudah ditekan oleh negara manapun. Menurut menteri pertahanan Qatar, rakyat akan siap membela negaranya dan mengharapkan krisis antara negara-negara teluk ini tidak sampai dilakukan intervensi militer(abc.net.au, 2017).

Berbagai upaya perdamaian pun dilakukan oleh berbagai pihak seperti Presiden Erdogan dari Turki, anggota Gulf Cooperation Council (GSS) Kuwait, Vladimir Putin dari Rusia dan terus mengajak negara-negara lain untuk terlibat dalam upaya perdamaian konflik tersebut. Dalam kasus ini Arab Saudi dan Negara lainnya memberikan 13 tuntutan yang harus disetujui Qatar dan memberikan waktu 10 hari dalam penyelesaian tuntutan tersebut.

Adapun 13 tuntutan tersebut ialah :

1. Menurunkan hubungan diplomatik dengan Iran dan menutup misi diplomatik Iran di Qatar, mengusir anggota Garda Revolusi Iran dan memutus kerja sama militer dan intelejen dengan Iran. Perdagangan dengan Iran harus sesuai dengan sanksi AS dan internasional dengan cara yang tidak membahayakan keamanan Dewan Kerjasama Teluk.
2. Segera menutup pangkalan militer Turki, yang saat ini sedang dalam tahap pembangunan, dan menghentikan kerja sama militer dengan Turki di dalam Qatar.
3. Memutus hubungan dengan semua “organisasi teroris, sektarian dan ideologis, ”khususnya Ikhwanul Muslimin, ISIS, alQaeda, Fateh al-Sham (dulunya bernama Jabhah Nusrah) dan Hizbullah Libanon. Secara resmi menyatakan pihak-pihak ini sebagai kelompok teror seperti yang diumumkan oleh Arab Saudi, Bahrain, UEA dan Mesir, dan menyetujui semua perbaharuan daftar ini di masa yang akan datang.
4. Menghentikan semua pendanaan bagi individu, kelompok ataupun organisasi yang telah dianggap sebagai teroris oleh Arab Saudi, UEA, Mesir, Bahrain, AS dan negara lain.
5. Menyerahkan “tokoh-tokoh teroris”, buronan dan individu yang dicari Arab Saudi, UEA, Mesir dan Bahrain ke negara asal mereka. Membekukan aset

mereka, dan memberikan informasi yang diinginkan mengenai tempat tinggal, gerakan dan keuangan- mereka.

6. Menutup Aljazeera dan stasiun afiliasinya.
7. Menghentikan intervensi hubungan internal kedaulatan negara. Berhenti memberikan kewarganegaraan pada buronan Arab Saudi, UEA, Mesir dan Bahrain. Mencabut kewarganegaraan Qatar bagi warga negara yang melanggar hukum di negara-negara tersebut.
8. Membayar perbaikan dan kompensasi kerugian nyawa dan kerugian finansial lain yang disebabkan oleh kebijakan Qatar di tahun-tahun ini. Jumlahnya akan ditentukan setelah kordinasi dengan Qatar.
9. Meluruskan kebijakan militer, politik, sosial dan ekonomi Qatar dengan negara Arab dan Teluk lainnya, serta masalah ekonomi, sesuai kesepakatan tahun 2014 yang dicapai dengan Arab Saudi.
10. Menghentikan komunikasi dengan oposisi politik di Arab Saudi, UEA, Mesir dan Bahrain. Menyerahkan berkas mengenai kontak Qatar dan dukungan pada kelompok oposisi, serta menyerahkan rincian terkait informasi pribadi mereka dan dukungan Qatar yang diberikan pada mereka
11. Menutup semua kantor berita yang didanai secara langsung dan tidak langsung oleh Qatar, termasuk Arabi, Rassd, Al Araby Al Jadeed, Mekameleen dan Middle East Eye (MEE), dan lainnya.
12. Menyetujui semua permintaan dalam waktu 10 hari setelah daftar diberikan pada Qatar, atau daftar ini akan menjadi tidak valid.
13. Menyetujui audit kepatuhan bulanan pada tahun pertama setelah menyetujui permintaan tersebut, diikuti oleh audit empat bulan sekali pada tahun kedua, dan audit tahunan di 10 tahun setelahnya. (tempo.co, 2017)

Dalam keputusan hubungan diplomatiknya dengan Qatar saat ini, Arab Saudi yang merupakan pemasok utama pangan Qatar memutuskan untuk mengembargo distribusi pangannya ke negara tersebut. Selain itu Arab Saudi juga menutup perbatasan udara, darat, dan laut dengan Qatar sehingga Qatar Airways terpaksa harus mengalihkan rute perjalanan udara Qatar melalui jalur Afrika dan Iran. Hal-hal tersebut diatas berdampak pada penurunan lantai bursa Qatar sebesar 7,2% (Atkinson, 2017). Dampak lainnya secara ekonomi adanya penurunan saham sebagian besar perusahaan di Qatar sebanyak 8%, perusahaan penerbangan yang mengalami kerugian, pasokan makanan dan pangan yang dimana Qatar selama ini bergantung terhadap komoditas pangan yang berada sebagian besar di Arab Saudi dan negara negara yang memutus hubungan diplomatik dengannya. Secara ekonomi penurunan ini merupakan yang terburuk selama beberapa dekade. Hal ini pula berdampak pada keamanan Qatar, karena keputusan diplomatik ini juga berlaku terhadap kerjasama dalam bidang militer terhadap negara teluk lainnya sehingga kredibilitas militer serta keamanan Qatar menurun karena selama ini Qatar berlindung pada negara negara Teluk hal ini pula mendesak Qatar untuk membangun hubungan atau aliansi dengan beberapa negara termasuk Iran untuk mencegah dampak tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini ialah sebagai berikut :

Bagaimana strategi pertahanan Qatar pasca keputusan hubungan diplomatik oleh Negara Negara Teluk pada tahun 2017?

C. Kerangka Pemikiran

Dalam hal ini permasalahan diatas akan dijelaskan dengan beberapa konsep dan teori. Konsep ialah abstraksi yang mempresentasikan sebuah objek, karakter objek, atau

fenomena tertentu (Mas'oed, 1990). Sedangkan teori ialah asas dan hukum yang menjadi dasar suatu keseniaan atau ilmu pengetahuan. Untuk menjawab rumusan masalah serta sebagai pedoman untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian dan analisis data yang ada serta mencegah pembahasan yang tidak signifikan maka penulis mencoba mengajukan kerangka berfikir untuk menjawab pertanyaan dalam tulisan ini adalah kerangka teoritis Balance of Threat (BoT), teori aliansi dan konsep *Building Military Capacity* sebagai analisis untuk mengkaji penelitian ini.

1. Balance of Threat (BoT)

Balance of Threat (BoT) merupakan upaya suatu negara untuk fokus pada power dan kekuatan yang tujuannya untuk pertahanan atau mungkin juga untuk dapat mengancam balik negara musuh. Menurut Stephen Walt, teori *Balance of Threat* (BoT) menjelaskan bagaimana suatu negara menghadapi ancaman dari negara musuh dengan berbagai upaya, diantaranya memilih beraliansi atau bekerjasama dengan negara negara *superpower*. Selain itu, Walt berpendapat dengan teori *Balance of Threat* (BoT) bahwa ketika terjadi ketidakseimbangan ancaman dari negara atau koalisi negara lain maka suatu negara akan membangun aliansi atau meningkatkan kemampuan internal untuk mengurangi kerawanannya (Vulnerability). Gabungan kekuatan eksternal dalam aliansi akan mengatasi kelemahan negara tersebut dalam menghadapi ancaman dari negara atau koalisi negara lain (Yani Y. M., 2015).

Teori *Balance of Threat* (BoT) menekankan pada upaya perimbangan untuk mengatasi ancaman yang ada, bukan mengimbangi kekuatan lawan. Untuk melihat tingkatan ancaman dari pihak lain, *balance of threat* memiliki daya ukur untuk melihat seberapa jauh kekuatan lawan dan kekuatan nasional untuk melakukan

perimbangan ancaman (Planifolia, 2017). Walt membagi empat tingkatan ancaman yang diberikan negara terhadap negara lain: pertama, Agregate Power adalah jumlah kekuatan suatu negara dimana semakin besar jumlah total sumber daya suatu negara seperti jumlah manusia, kapabilitas militer dan industri, dan kemajuan teknologi, maka semakin besar pula ancaman yang dapat diberikan oleh negara tersebut terhadap negara lain. Kedua, geographic proximity yakni kemampuan memberikan ancaman terhalangi oleh jarak, dimana negara yang lebih dekat mendapatkan ancaman yang lebih besar dari negara yang lebih jauh. Negara cenderung melakukan aliansi sebagai respon terhadap negara tetangga yang kuat dibandingkan dengan negara yang berada jauh. Ketiga, Offensive Capability ialah kemampuan untuk mengancam kedaulatan atau integritas wilayah dari negara lain. Offensive Capability lebih memfokuskan sisi militer seperti alat-alat persenjataan serta teknologi maupun kuantitas persenjataan. Keempat, Aggressiveness of its Intentions yakni bagaimana niat dan cara suatu negara mengancam negara musuh, baik itu berupa kebijakan luar negeri, kerjasama dengan negara lain atau beraliansi, membangun pangkalan militer ataupun melakukan pelanggaran batas wilayah (Yani, 2017).

Untuk melakukan upaya Balance of Threat, berikut 2 konsep yang akan mendukung teori ini yakni konsep aliansi dan building military capacity seperti yang dijelaskan diatas dimana 2 hal tersebut merupakan bagian dari upaya Balance of Threat. Konsep aliansi dan Building military capacity akan menjawab dan membuktikan Teori tersebut.

2. Aliansi

Menurut Stephen Walt dalam studi seminalis tentang asal-usul aliansi, ia mendefinisikan aliansi ialah hubungan formal atau informal dari kerjasama

keamanan antara dua atau lebih negara berdaulat (Williams, 2008). Menurut Walt kemungkinan negara untuk memilih beraliansi selalu ada, bahkan untuk negara dengan kapabilitas sedang sekalipun terdorong untuk melakukan aliansi. Dengan mengacu pada teori aliansi menurut Stephen Walt, maka dapat ditinjau bahwa peningkatan hubungan dalam bidang pertahanan dan energi dengan Iran dan Turki adalah salah satu cara yang diambil Qatar untuk tetap bertahan dalam masa sanksi yang diberikan oleh Arab Saudi dan aliansinya.

Adapun syarat terbentuknya aliansi ialah adanya kesepakatan antara dua atau lebih negara dimana aliansi memiliki tujuan dalam menambah kekuatan relatif anggota terhadap negara lain (Syafiq, 2016). Dengan menggabungkan kapabilitas kekuatan, dua atau lebih negara dapat menggunakan pengaruh yang lebih besar dalam posisi tawar dengan negara lain. Bagi negara yang lebih kecil, aliansi dapat menjadi elemen kekuatan penting dan bagi negara kuat struktur aliansi membentuk konfigurasi kekuatan dalam sistem. Terdapat beberapa faktor yang mendorong terbentuknya aliansi, selain untuk mempertahankan diri dari ancaman musuh yakni adanya faktor ideologi yang sama. Negara akan memilih beraliansi dengan negara lain yang sama dimana faktor ekonomi, hubungan ekonomi yang erat dapat menciptakan suatu aliansi yang kuat terutama jika negara bergantung satu sama lain. Negara biasanya membentuk aliansi atau kerjasama dengan negara yang kuat atau memiliki power yang kuat atau dapat melakukan aliansi untuk mencari kekuatan. Ketika ada imbalance dalam ancaman, negara akan membentuk suatu aliansi atau meningkatkan pertahanan dan keamanan internal untuk mengurangi kerentanan suatu negara.

Sementara itu, Walt berpendapat bahwa aliansi dapat melemah yang disebabkan oleh beberapa alasan yaitu: pertama, adanya perubahan persepsi

ancaman dimana aliansi dibangun untuk merespon suatu ancaman yang dipersepsikan bersama oleh sekelompok negara dalam aliansi. Apabila persepsi salah satu negara anggota aliansi berubah maka keberadaan aliansi menjadi tidak relevan lagi karena tidak adalagi musuh yang dijadikan alasan pembentukan aliansi. Kedua, menurunnya kredibilitas aliansi; aliansi dibangun untuk menjadi psychological deterrent bagi potensi musuh. Namun apabila aliansi sama sekali tidak memberikan ancaman yang signifikan bagi potensi musuh maka eksistensi aliansi tidak lagi relevan. Selain itu kredibilitas aliansi akan runtuh apabila negara anggota aliansi memilih untuk tidak terlibat dalam konflik. Ketiga, perubahan politik domestik negara anggota aliansi. Apabila terjadi perubahan rejim kekuasaan politik suatu anggota aliansi dan rejim yang baru memiliki persepsi ancaman yang sama sekali berbeda atas negara yang lain maka eksistensi aliansi tidak lagi relevan(Cavelty & Balzacq, 2017).

3. Building Military Capacity

Power merupakan salah satu bagian terpenting bagi suatu negara dimana negara bertujuan mengejar power untuk mempertahankan negaranya dari situasi internasional yang anarki. Dalam hal ini, Peningkatan kapabilitas militer Qatar dapat dijelaskan dengan perspektif *Defensive Realism* dimana sistem internasional memicu negara untuk meningkatkan power sehingga dapat melakukan survival. *Defensive Realism* merupakan suatu cara negara untuk meningkatkan power bukan untuk melebihi hegemoni melainkan mempertahankan power mereka dalam sistem.

Menurut Stephen Walt's dalam "*Balance of Threat*" *defensive Realism* ialah keseimbangan kekuatan terhadap ancaman dimana hal tersebut lebih penting dibandingkan peningkatan *power* hanya untuk menjadi *super power*. Menurut

Boulding, Defensive Realism menekankan pada teknologi dan geopolitik, dimana ancaman dapat muncul dari konflik atau sengketa wilayah yang berujung kepada peningkatan power dan pertahanan militer berupa peningkatan kapasitas dan kapabilitas militer, dan pengembangan senjata pertahanan berteknologi canggih. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir ancaman dalam sistem (Yani, Montratama, & Mahyudin, Pengantar Studi Keamanan, 2017).

Peningkatan kapabilitas militer merupakan kebijakan penting dalam stabilitas politik suatu negara tidak hanya sebagai strategi dalam pertahanan. Dengan semakin superiornya kapabilitas militer yang dimiliki negara maka semakin besar pula kapasitas negara tersebut untuk bertahan dalam lingkungan internasional. Selain sebagai alat mendesak, militer juga meningkatkan status negara sehingga lebih disegani kawan atau lawan. Kekuatan militer secara psikologis dapat menimbulkan kesadaran bagi negara-negara lain untuk mulai memperhitungkan kapabilitas militer suatu negara. Pembelian senjata, peningkatan anggaran belanja militer, pembaharuan teknologi senjata, latihan militer gabungan, parade militer dan konvoi senjata.

D. Hipotesis

Berdasarkan teori dan konsep yang dipaparkan untuk menjawab rumusan masalah di atas maka Strategi Pertahanan Qatar Pasca Pemutusan Hubungan Diplomatik oleh Negara Teluk tahun 2017 ialah :

1. Qatar melakukan kerjasama militer dan peningkatan hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat, Iran, Turki dan Rusia sebagai strategi pertahanan atas sanksi yang diberikan oleh Arab Saudi dan aliansi.

2. Qatar berusaha meningkatkan kapasitas militer untuk menjaga stabilitas keamanan regional.

E. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini adapun tujuan penelitian yaitu :

1. Untuk mengetahui dampak pemutusan hubungan diplomatik terhadap pertahanan keamanan regional Qatar.
2. Menjelaskan strategi Qatar dalam segi pertahanan pasca pemutusan hubungan diplomatik oleh negara negara teluk tahun 2017.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Qatar dalam menanggulangi dampak dari pemutusan hubungan diplomatik tersebut.

F. Jangkauan Penelitian

Untuk membatasi fokus pembahasan dalam penelitian ini agar tetap dalam konteks masalah yang diteliti, maka penulis menganalisis tentang strategi pertahanan Qatar pasca pemutusan hubungan diplomatik tahun 2017 hingga tahun 2019.

G. Metodologi Penelitian

1. Unit Analisis dan Unit Ekspansi
 - a. Unit Analisis merupakan objek yang perilakunya akan di analisa atau disebut dengan variabel dependen. Penelitian ini memperoleh unit analisa sebagai berikut :
 - Unit Analisis : Strategi Pertahanan Qatar Pasca Pemutusan Hubungan Diplomatik.
 - Tingkat analisa : Negara Bangsa

b. Unit Ekplanasi merupakan objek yang mempengaruhi perilaku unit analisa atau disebut dengan variabel independen. Penelitian ini memperoleh unit eksplanasi sebagai berikut :

- Unit Eksplanasi : Pemutusan Hubungan Diplomatik oleh Negara Teluk terhadap Qatar
- Tingkat Analisa : Negara Bangsa

Adapun jenis analisa penelitian tersebut adalah Korelasionis dimana tingkat analisa sejajar dengan tingkat eksplanasi.

2. Jenis Penelitian dan Jenis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif mengenai strategi pertahanan Qatar pasca pemutusan hubungan diplomatik oleh negara teluk tahun 2017. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang spesifikasi atau detail dan cenderung menggunakan analisis. Data dan informasi dari penelitian ini diperoleh melalui data primer dan sekunder. Data primer ialah data yang berupa buku berkaitan langsung dengan penelitian ini. Adapun data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, surat kabar, berita *online*, situs situs online serta sumber lain yang relevan dan dapat mendukung keaslian data dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis mengumpulkan berbagai sumber dari literatur baik berupa buku, jurnal ilmiah, berita, surat kabar, laporan media, dan dari data website resmi pemerintah.

H. Sistematika Penulisan

BAB I : dalam bab ini memaparkan Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka berfikir meliputi teori dan konsep, hipotesis, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai informasi umum meliputi geografis, sistem politik, militer dan hubungan baik Qatar dengan Negara Teluk. Selain itu kerjasama antar negara serta perkembangan pertahanan Qatar sebelum pemutusan hubungan diplomatik. Untuk membatasi fokus pembahasan dalam penelitian ini agar tetap dalam konteks masalah yang diteliti, maka penulis menganalisis tentang strategi pertahanan Qatar pasca pemutusan hubungan diplomatik tahun 2017 hingga tahun 2019.

BAB III : Dalam bab ini akan membahas memburuknya hubungan diplomatik Qatar dengan Arab Saudi, Bahrain, Mesir, dan Uni Emirates Arab serta sanksi yang diberikan oleh negara negara Teluk.

BAB IV : dalam bab ini penulis akan menjelaskan dan memaparkan usaha serta upaya Qatar dalam meningkatkan kapasitas – kapabilitas militer untuk menjaga stabilitas keamanan dan pertahanan negaranya serta menjelaskan kerjasama militer Qatar dan peningkatan hubungan diplomatik dengan Iran, Amerika Serikat, Turki dan Rusia sebagai strategi pertahanan atas sanksi yang diberikan oleh Arab Saudi dan aliansi.

BAB V : dalam bab ini berisi tentang penutupan dan kesimpulan dari pembahasan bab-bab yang telah dijelaskan sebelumnya